

**ASPEK KEPATUHAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA: STUDI KASUS
ATAS PUTUSAN 604/G/2023/PTUN.JKT**

SKRIPSI

**Oleh
ACHMAD FAGIL ABRORI
NIM. 05020422021**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Fagil Abrori
NIM : 05020422021
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Aspek Kepatuhan Mahkamah Konstitusi Terhadap
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Atas
Putusan 604/G/2023/Ptun.Jkt

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 17 November 2025

Yang menyatakan,



Achmad Fagil Abrori
NIM. 05020422021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Achmad Fagil Abrori

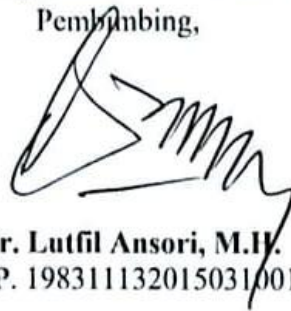
NIM : 05020422021

Judul : Aspek Kepatuhan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Atas Putusan
604/G/2023/Ptun.Jkt

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 17 November 2025

Pembimbing,



Dr. Lutfil Ansori, M.H.
NIP. 198311132015031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Achmad Fagil Abrori

NIM. : 05020422021

Judul : Aspek Kepatuhan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Atas Putusan 604/G/2023/Ptun.Jkt

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. Lutfil Ansori, M.P.
NIP. 198311132015031001

Penguji II



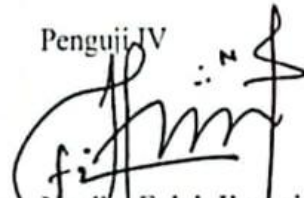
Dr. H. Muwahid, S.H., M.Hum.
NIP. 197803102005011004

Penguji III



Achmad Saffudin R., M.H.
NIP. 199212292019031005

Penguji IV



Nurika Falah Ilmania, S.H., M.H.
NIP. 200005032025052009

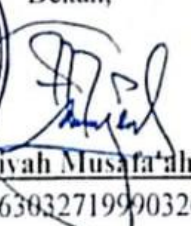
Surabaya, 24 Desember 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Sugiyah Musafahah, M.Ag.
NIP. 196303271990032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Fagil Abrori
NIM : 05020422021
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Jurusan Hukum Publik/Prodi Hukum Tata Negara
E-mail address : achmadfagilabrori194@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Aspek Kepatuhan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Atas Putusan 604/G/2023/PTUN.JKT

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Januari 2026

Penulis

Achmad Fagil Abrori

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum menegaskan bahwa setiap lembaga negara wajib tunduk pada supremasi hukum dan putusan pengadilan. Namun, dalam praktik ketatanegaraan muncul problematika kepatuhan Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT yang membatalkan Keputusan MK Nomor 17 Tahun 2023 tentang pengangkatan Ketua MK. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah utama: pertama, bagaimana kepatuhan Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan PTUN Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT; kedua, bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap keabsahan kepemimpinan Ketua MK dalam perspektif hukum positif dan *siyāsah dusturīyyah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum tata negara, serta karya akademik terkait *fiqh siyāsah*. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menekankan keterkaitan antara teori kepatuhan hukum, prinsip negara hukum, mekanisme *checks and balances*, serta konsep *siyāsah dusturīyyah* dalam menilai kepatuhan MK terhadap putusan PTUN.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan PTUN Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT bersifat formal tetapi tidak substantif. MK memang menindaklanjuti putusan dengan menerbitkan Keputusan Nomor 8 Tahun 2024, namun pelaksanaannya melewati tenggat waktu 60 hari sebagaimana diatur dalam UU PTUN dan tidak disertai transparansi publik yang memadai. Implikasi dari kondisi tersebut adalah hilangnya keabsahan Keputusan MK Nomor 17 Tahun 2023, sehingga kepemimpinan Ketua MK yang lahir dari keputusan tersebut menjadi tidak sah secara yuridis. Keabsahan baru muncul setelah diterbitkannya Keputusan Nomor 8 Tahun 2024, namun dalam perspektif *siyāsah dusturīyyah* legitimasi kepemimpinan tersebut tetap menyisakan problem etik dan yuridis karena proses pelaksanaannya tidak mencerminkan prinsip amanah dan keadilan serta menimbulkan persoalan akuntabilitas dan transparansi publik.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar Mahkamah Konstitusi memperkuat mekanisme kepatuhan terhadap putusan pengadilan dengan memastikan pelaksanaan tepat waktu dan transparan, sehingga asas kepastian hukum dan akuntabilitas dapat terjaga. Secara akademis, penelitian ini merekomendasikan pengembangan kajian lebih lanjut mengenai relasi antar lembaga peradilan dalam kerangka *checks and balances*, serta integrasi perspektif hukum positif dan *siyāsah* Islam dalam menilai legitimasi kepemimpinan lembaga negara.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Landasan Teori.....	16
H. Definisi Operasional	19
I. Metode Penelitian	20
BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL.....	25
A. Teori Kepatuhan Hukum	25
1. Pengertian Kepatuhan Hukum	25
2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Hukum	27
3. Relevansi Teori Kepatuhan Hukum dalam Konteks Lembaga Negara	29

B. Teori Negara Hukum.....	31
1. Konsep <i>Rechtsstaat</i> dan <i>Rule of Law</i>	31
2. Prinsip Supremasi Hukum dalam UUD NRI 1945.....	35
3. Kewajiban Lembaga Negara Menaati Putusan Pengadilan.....	37
C. Teori Pemisahan Kekuasaan dan <i>Checks And Balances</i>	40
1. Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan	40
2. <i>Checks and Balances</i> dalam Ketatanegaraan Indonesia.....	42
3. Dimensi Kepatuhan Hukum Mahkamah Konstitusi.....	46
4. Kedudukan Lembaga Peradilan dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia	49
5. Relasi Antar Lembaga Peradilan (MK, MA, PTUN).....	52
D. Teori <i>Siyāsah Dustūriyyah</i>	54
1. Definisi dan Ruang Lingkup <i>Siyāsah Dustūriyyah</i>	54
2. Prinsip-Prinsip Dasar <i>Siyāsah Dustūriyyah</i> (<i>Al-‘Adl, Al-Amanah, Al-Maslahah</i>).....	57
3. Legitimasi Kepemimpinan dalam Perspektif Islam.....	59
BAB III KEPATUHAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.....	62
A. Deskripsi Analisis Putusan 604/G/2023/PTUN.JKT	62
1. Objek Sengketa dan Pihak Yang Berperkara	62
2. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.....	64
3. Amar Putusan dan Kekuatan Hukum Tetap.....	69
B. Tanggapan Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.....	71
1. Tanggapan Mahkamah Konstitusi pada Tahap Upaya Hukum	71
2. Tanggapan Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Berkekuatan Hukum Tetap	74

C. Analisis Kepatuhan Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.....	79
1. Kepatuhan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Negara Hukum dan Supremasi Hukum	79
2. Kepatuhan Mahkamah Konstitusi dalam Bingkai <i>Checks and Balances</i> ...	82
BAB IV IMPLIKASI PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP KEABSAHAN KEPEMIMPINAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI.....	86
A. Implikasi Putusan PTUN terhadap Keabsahan Kepemimpinan Ketua MK dalam Perspektif Hukum Positif.....	86
1. Akibat Hukum Putusan PTUN terhadap Keputusan MK Nomor 17 Tahun 2023	86
2. Kedudukan Keputusan MK Nomor 8 Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan PTUN.....	88
3. Keabsahan Kepemimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi Pasca Terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2024	91
B. Implikasi Putusan PTUN terhadap Keabsahan Kepemimpinan Ketua MK dalam Perspektif <i>Siyāṣah Dusturīyyah</i>	93
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN.....	105
BIOGRAFI PENULIS	111

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adnan, Indra Muchlis. *Negara Hukum dan Demokrasi*. Edisi Revi. Bantul: Trussmedia Grafika, 2019.
- Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam (Terjemahan Al-Aḥkām Al-Sulṭānīyah Wa-Al-Wilāyāt Al-Dīnīyah)*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Anshori, Luthfil. *Legal Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Edited by Yayat Sri Hayati. Edisi ke-. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022.
- Asshiddiqie, Jimli. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Edited by Muchamad Ali Safa'at, Pan Mohammad Faiz, Abiarsya, Aziz Hakim, Irvan A, and Subhan Hariri. Cetakan pe. jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- . “Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi.” *MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA* (2008): 10–23.
- . *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Edited by Tarmizi. Edisi ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- . “Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi.” *Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI* (2006): hlm.203.
- . *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Dicey, A. V. *Introduction to The Study of The Law of The Constitution*. London: Mac Millan and Co. Limited, 1915.
- Friedman, L M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.
- Imran, Mohammad Fadil. *Perbandingan Sistem Hukum*. Batam: CV. Tahta Media Group, 2024.
- Kamma, Hamzah, Mahrida, Moh. Mujibur Rohman, Mohammad Hendry Musthofa, Mohammadong, M. Aris Rofiqi, Fauzi, et al. *Fiqh Siyasah: Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani*. Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Simpul siyāsah dusturīyyah*. Edited by M. Harir Muzakki. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Locke, John. *Two Treatises on Civil Goverment*. London: J. M. Dent & Sons LTD, 1924.
- Montesquieu, Baron De. *The Spirit of Laws Translated From the French by Thomas Nugent*. New York: The Colonial Press, 1899.

- Paramitha, Amelia Ayu, Ibnu Sam Widodo, Fakhry Amin, Muhammad Fajar, Sidiq Widodo, Hutrin Kamil, Mohamad Hidayat Muhtar, et al. *Hukum Administrasi Negara*. Edited by Anik Ifitah. Kab. Serang-Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Patawari. *Konsep Negara Hukum dan Keterwakilan Rakyat (Perbandingan Sistem Parlemen Beberapa Negara)*. Edited by Ahsan Yunus. Makassar: PKBM Rumah Buku Cara-Baca, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Santoso, Aris Prio Agus, Ahmad Rifai, Edy Wijayanti, and Rina Arum Prastyanti. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023.
- Sari, Elidar, and Hadi Iskandar. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Aceh: BieNa Edukasi, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Stahl, Friedrich Julius. *Rechts- Und Staatslehre Auf Der Grundlage Christlicher Weltanschauung*. Heidelberg: J.C.B. Mohr, 1854.
- Tahir, Rusdin, I Gde Pantja Astawa, Agus Widjajanto, Mompang L. Pangabean, Moh. Mujibur Rohman, Ni Putu Paramita Dewi, Nandang Alamsah Deliarnoor, et al. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. Edited by Moh. Mujibur Rohman. Jambi: PT. SonPedia Publishing Indonesia, 2023.
- Utama, Andrew Shandy, Maria Alberta Liza Quintarti, Henny Saida Flora, M. Azham Ilham, Miftahul Jannah, Tommy Nugraha Manoppo, Prisko Yanuarius Djawaria Pare, Airlangga Putera, Sri Ayu Astuti, and Teresia Din. *Dinamika Penegakan Hukum Di Indonesia*. Edited by Paput Tri Cahyono. Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2025.

JURNAL

- Adrian, Annisa Zahra, CharismaChristian Alam Tegar, Muhammad Afir Ridho Azaby, and Siti Nurul Fadilah. "Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu." *Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 2 (2022): 1–25.
- Akbar, Muhamad Aksan. "Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengaduan Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 571–585.
- Alaryahiyyah, Fadan Buljah, Muhammad Rifki, Revan Sauqi, Muhammad Bahri, and Ade Fartini. "Konflik Kewenangan Antar Lembaga Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menempatkan Pembagian Kewenangan Antar Lembaga Negara Sebagai Elemen Sentral Untuk Menjaga Prinsip Negara Hukum dan Mekanisme Checks." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 2, no. 3 (2025): 19–36.

- Arifin, Firdaus. "The Dynamics of State Administrative Law in Indonesia: A Critical Study As a Result of Anwar Usman'S Lawsuit in the State Administrative Court." *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2024): 184–193.
- Arya, Mohammad Fernanda, Muhamad Aksan Akbar, and Syamsul Rijal. "Implikasi Hukum Ketidakpatuhan Pejabat Pemerintahan Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara." *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 2, no. 2 (2024): 207–214.
- Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." In *Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan. Vol. 1*, 2011.
- Biggart, Nicole Woolsey, and Gary G Hamilton. "The Power of Obedience." *Administrative Science Quarterly* 29, no. 4 (October 22, 1984): 540–549. <http://www.jstor.org/stable/2392938>.
- Diana, Rashda, Abdul Rohman, and Harisman H. "Konsep Kepemimpinan Islam: Telaah Pemikiran Politik Islam Al-Mawardi." *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 19, no. 2 (2021).
- Dinata, Ari Wirya. "Legal Implications of Non-Compliance With the Decision of the State Administrative Court in Terms of the Implementation of Regional Autonomy and the I . Pendahu." *Jurnal Hukum Peratun* 4, no. 1 (2021): 1–30.
- Dwiputra, Made Suka, and Trilogi Peradilan. "Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan Dalam Perbuatan Melwawan Hukum Dalam Perspektif Trilogi Peradilan dan Pronsip Aanmaning." *KERTA DYATMIKA : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra* 20, no. 1 (2023): 38–50.
- Feng, Jiachen. "The Idea of Division and Balance of Powers and How It Guarantees Individual Rights and Freedoms." *International Journal of Frontiers in Sociology* 6, no. 5 (2024): 1–6.
- Hasanuddin, Ashar, Abd. Rahman, and Aan Aswari. "Integritas Hakim Terhadap Penegakan Supremasi Hukum Di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara." *Journal of Lex Theory (JLT)* 6, no. 1 (2025): 244–255.
- Idrus, Achmad Musyahid. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun." *Ad-daulah* 10, no. 2 (2021): 123–137.
- Krisna, Swante Adi. "Konsep Hukum Progresif Dalam Pemikiran Satjipto Rahardjo." *Swante Adi Krisna Digital Publications* 2025, no. 04 (2025): 1–12.
- Kusumawardhani, Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas. "Putusan Pengadilan Di Indonesia Dalam Bingkai Sistem Penegakan Hukum Nasional." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 1 (2020): 26.
- Marzuki, Ismail. "The Rule of Law and the Principle of Equality Before the Law: Theory and Its Manifestation in Indonesia." *Jurnal Idea Hukum* 10, no. 1 (2024): 13–23.

- Muabezi, Zahermann Armandz. "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat) Rule Of Law And Not Power State." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 421–446.
- Mukhlishin, and Sarip. "Keadilan dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif 'Al-'Adl' Dalam Al-Qur'an." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2020): 55.
- Nuriyanti, Mumtazinur, dan Nurul Fitria. "Analisis Prinsip Al-Adalah Dalam Putusan PTUN Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 8, no. 3 (2025): 1–16.
- Pratama, Yudha, and Muhammad Aini. "Pengukuran dan Faktor Penentu Efektivitas Hukum Dalam Implementasi Kebijakan dan Penegakan Keadilan." *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner* 9, no. 7 (2025): 151–155.
- Putri Edytya, Nindya, and Reyhan Satya Prawira. "Kenyataan Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum dan Pembangunan: Hukum Harus Ditaati Atau Ditakuti?" *Lex Scientia Law Review* 3, no. 2 (2019): 177–190.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 1–25.
- Setiadi, Edi. "Hubungan Ideal Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (2021): 161–176.
- Suparto. "Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam." *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 1 (2019): 134–149.
- Syafri Hariansah. "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum." *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2024): 121–130.
- Syahir, Ahmad, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 930–944.
- Syailendra, Moody Rizqy, Joel Natanael, Michelle Heydee Kurniawan, and Universitas Tarumanagara Jakarta. "Peran Konstitusi Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi dan Supremasi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Multilingual* 4, no. 4 (2024): 1–15.
- Syamsarina, Syamsarina, M. Ibrahim Aziz, Arzam Arzam, Defril Hidayat, and Ari Bakti Windi Aji. "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat." *Jurnal Selat* 10, no. 1 (2022): 81–90.
- Widya Utami. "Perbandingan Kewenangan Badan Legislatif Di Indonesia dan Amerika Serikat (Perspektif Pembuatan Undang-Undang)." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 4, no. 1 (2024): 105–136.

SKRIPSI

Aliaman, Cendikia. “Implikasi Hukum Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perspektif Konstitusional.” *Skripsi* (2025): 124.

Fahmi, Mohamad Wachdana Ulul. “Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Pelanggaran Etik Hakim Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan 604/G/2023/PTUN.JKT).” *Skripsi* (2024): 88.

Samudra, Ravanza Hasan. “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT Tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Jabatan 2023–2028 Perspektif Wilāyatul Al-Mazālim.” *Skripsi* (2024): 73.

Samudra, Ravanza Hasan. “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT Tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Jabatan 2023–2028 Perspektif Wilāyatul Al-Mazālim.” *Skripsi* (2024): 73.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pada Tingkat Pertama, Anwar Usman v. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT., 13 Agustus 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

SURAT KABAR

Dewi, Santi. “MK Ajukan Banding Atas Putusan PTUN Yang Kabulkan Gugatan Anwar Usman.” *IDN Times*. Accessed September 1, 2025. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/mk-ajukan-banding-atas-putusan-ptun-yang-kabulkan-gugatan-anwar-usman-00-bbwlv-w5cdjx>.

“Jimly Asshiddiqie: Belum Inkrah, Putusan Suhartoyo Di MK Masih Berlaku.” Accessed October 28, 2025. <https://www.inilah.com/jimly-asshiddiqie-belum-inkrah-putusan-suhartoyo-di-mk-masih-berlaku>.

“MK Tegaskan Suhartoyo Masih Sah Jadi Ketua Hingga Putusan PTUN Inkrah - Bagian All.” Accessed October 28, 2025. <https://www.inews.id/news/nasional/mk-tegaskan-suhartoyo-masih-sah-jadi-ketua-hingga-putusan-ptun-inkrah/all>.

DATA ELEKTRONIK

Hadis: Kalian Semua Adalah Pemimpin, dan Akan Ditanya Tentang Apa Yang Dipimpinnya - Ensiklopedia Terjemahan Hadis-Hadis Nabi.” Accessed October 31, 2025. <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/5819>.

Jimly: Judicial Review Pilar Menjaga *checks and balances*.” Accessed October 31, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/prof-jimly--judicial-review-pilar-menjaga-checks-and-balances-lt6895b0fce6669/>.

Kepatuhan (Obedience) - Pengertian, Aspek, Indikator dan Faktor Yang Mempengaruhi.” Accessed October 22, 2025. <https://www.kajianpustaka.com/2021/05/kepatuhan-obedience.html>.

MKMK Respons Pemberitaan Soal Keabsahan Status Ketua MK Suhartoyo - Berita | Mahkamah Konstitusi RI.” Accessed December 20, 2025. <https://www.mkri.id/berita/mkkmk-respons-pemberitaan-soal-keabsahan-status-ketua-mk-suhartoyo-24251>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A